

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) dapat digunakan sebagai panduan dalam memahami konsep akuntabilitas publik sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku pelaksana (*agent*) yang mewakili kepentingan masyarakat (pemberi amanah/*principal*). Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dengan cara menggambarkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan kegiatan yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya kepada masyarakat yang memberikan amanah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki hak dan wewenang untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah sebagai perwakilan rakyat Haryanto dkk., (2007).

Menurut Yusrianti dkk., (2013) menjelaskan bahwa terdapat kaitan yang erat antara riset berdasarkan teori agensi dan peran pemerintah sebagai agen yang mengelola urusan pemerintah. Pemerintah perlu merumuskan strategi khusus guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sebagai pihak prinsipal. Dalam konteks pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik, masalah keagenan menjadi landasan konsep, yang didasarkan pada teori agensi. Teori keagenan menyoroiti permasalahan agensi yang muncul saat hubungan keagenan terbentuk antara pihak prinsipal dan agen.

Sesuai dengan hal yang telah dijelaskan di atas masalah keagenan dalam konteks akuntabilitas kinerja di lembaga pemerintahan merupakan suatu konsep yang muncul berdasarkan prinsip-prinsip teori keagenan. Pemerintah, berperan sebagai agen, memiliki tanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan. Dalam peran ini, pemerintah harus mampu menghadirkan informasi yang bernilai dalam pengungkapan anggaran yang diperlukan. Selain itu, peran agen yang diemban oleh pemerintah juga harus menunjukkan bahwa kompetensi para pegawainya bisa diandalkan dan dipercaya oleh publik dalam pelaksanaan tujuan

anggaran yang telah diberikan. Tujuan anggaran yang jelas memiliki peran penting karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di dalam pemerintahan. Fokus yang tajam pada penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien, dengan jelas terlihat bagaimana dana anggaran diarahkan dan dimanfaatkan.

2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, “Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi yang disusun secara periodik”.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor:239/1X/6/8/2003 agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018:28) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.3 Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut :

1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan
3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Sebagai suatu sistem, penyelenggaraan SAKIP terdiri atas komponen-komponen yang terintegrasi, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra memiliki posisi yang sangat strategis. Renstra berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJMN, di mana dalam penyusunan Renstra harus berpedoman pada RPJMN. Selain itu, Renstra juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Renja.

Alur penyusunan Renstra K/L merupakan rangkaian proses/kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen Renstra K/L untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya. Penyusunan Renstra K/L dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Dalam penyusunan Renstra K/L, pimpinan Kementerian/Lembaga harus berpedoman pada RPJMN dan memperhatikan himpunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, serta memperhatikan aspirasi Masyarakat.

2. Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

a. Renja Kerja (Renja)

Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP.

b. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan

dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisi penugasan antara atasan dan bawahan, atau kesepakatan antara pemberi tanggung jawab dengan penerima tanggung jawab, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) serta anggaran yang tercantum pada Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, seluruh satuan kerja diwajibkan menyusun perjanjian kinerja pada setiap tingkatannya.

B. Pengukuran Kinerja

Salah satu komponen dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menjamin peningkatan kualitas pencapaian kinerja khususnya dalam akuntabilitas capaian *output* dan *outcome* serta dampak yang dihasilkan dalam suatu aktivitas birokrasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merefleksikan filosofi dan kultur dari suatu organisasi serta menggambarkan seberapa baik suatu kinerja telah diselesaikan dengan biaya, waktu, dan kualitas yang optimal.

1. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja organisasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas penerapan strategi yang ditetapkan. Pengukuran kinerja baik

kuantitatif maupun kualitatif harus dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, mulai tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai (*ex-post*).

2. Pengukuran Kinerja Individu

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara periodik (bulanan atau triwulanan) dan tahunan.

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

2. Reviu Laporan Kinerja Kementerian

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi akuntabilitas kinerja adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan setiap tahun secara berjenjang oleh tim evaluator yang ditunjuk melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Setiap surat tugas yang diterbitkan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta sasaran dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada unit kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. LHE AKIP pada Unit Kerja yang dievaluasi oleh evaluator, disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri. Ikhtisar keseluruhan dari LHE tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB.

2.1.4 Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018:75) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut Mulyadi dkk., (2018) kejelasan sasaran anggaran berarti sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan terperinci sehingga dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Menurut Rahayu & Yudi, (2021) kejelasan sasaran anggaran dapat membantu para pejabat mencapai kinerja yang diharapkan, di mana mengetahui sasaran anggaran yang jelas dapat mencapai tingkat kinerja yang dicapai. Dengan sasaran anggaran yang jelas, maka akan lebih mudah untuk

mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Fungsi anggaran menurut Mardiasmo (2018:78) adalah :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
Anggaran sebagai alat fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2.1.5 Pengendalian Akuntansi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, pengendalian akuntansi dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pemerintah daerah untuk mencapai tujuan sehingga mampu memberikan keyakinan yang memadai melalui terwujudnya laporan keuangan yang andal, terlaksananya kegiatan dan program secara efektif dan efisien, serta tertaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meminimalisir terjadinya salah catat dan memenuhi keakuratan pencatatan transaksi keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku maka diperlukan pengendalian akuntansi. Transparansi AKIP dapat terwujud dengan cara memperbaiki sistem akuntansi sektor publik yang mampu meningkatkan pengendalian dan perencanaan dalam setiap aktivitas

Menurut Mulyadi (2016:129) Pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sedangkan menurut Paramitha, (2016) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi adalah proses untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar secara efektif mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu.

Menurut Hidayat dkk., (2021) pengendalian akuntansi mencakup sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi. Sistem akuntansi merupakan hal yang penting karena dapat dijadikan

alat untuk memotivasi, mengukur dan memberikan sanksi atas tindakan pegawai dalam organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi merupakan suatu perencanaan, prosedur, catatan dan kebijakan terkait dengan penjagaan aktiva atau harta organisasi.

2.1.6 Sistem Pelaporan

Akuntansi dan laporan keuangan memiliki arti sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran informasi yang berguna untuk membuat keputusan dan mengevaluasi kerja organisasi. Menurut Mulyadi (2016:4) Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok.

Sistem pelaporan kinerja mencerminkan komitmen untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang dapat ditagih. Diperlukan sistem pelaporan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Dalam laporan patut di tunjukan hasil pekerjaan, tanggung jawab dimasukkan dalam anggaran dan fungsi laporan bila diikuti dengan penjelasan penyebab terjadinya penyalahgunaan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP: 2000) laporan keuangan yang baik harus tersusun secara jujur, objektif dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) digunakan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan atau laporan keuangan pokok terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional

- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dalam kerangka konseptual menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode, pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan dalam tabel 2.1 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
1.	(Anisa & Haryanto, 2022)	X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran X ₂ : Pengendalian Akuntansi X ₃ : Sistem Pelaporan	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19	1. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap AKIP 2. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap AKIP 3. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap AKIP
2	(Septiyani dkk., 2020)	X ₁ : Kompetensi Aparatur Pemerintah X ₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi X ₃ : Pengendalian Akuntansi X ₄ : Sistem Pelaporan	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	1. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap AKIP 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap AKIP 3. Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap AKIP

No	Nama Peneliti	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
				4. Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap AKIP
3.	(Aprilianti dkk., 2020)	X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran X ₂ : Pengendalian Internal X ₃ : Sistem Pelaporan	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan	1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap AKIP 2. Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP 3. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP
4.	(Febrianti & Yuhertiana, 2021)	X ₁ : Anggaran Berbasis Kinerja X ₂ : Ketepatan Sasaran Anggaran X ₃ : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya	1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap AKIP 2. Ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap AKIP 3. Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap AKIP
5.	(Rahayu & Yudi, 2021)	X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran X ₂ : Sistem Pengendalian Intern	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi	1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP 2. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP
6.	(Mulyadi dkk., 2018)	X ₁ : Sistem Pelaporan X ₂ : Kejelasan Sasaran Anggaran	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Aceh	1. Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap AKIP 2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap AKIP
7.	(Hidayat dkk., 2021)	X ₁ : <i>Good Governance</i> X ₂ : Kompetensi X ₃ : Pengendalian Akuntansi	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar	1. <i>Good governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap AKIP 2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap AKIP 3. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap AKIP

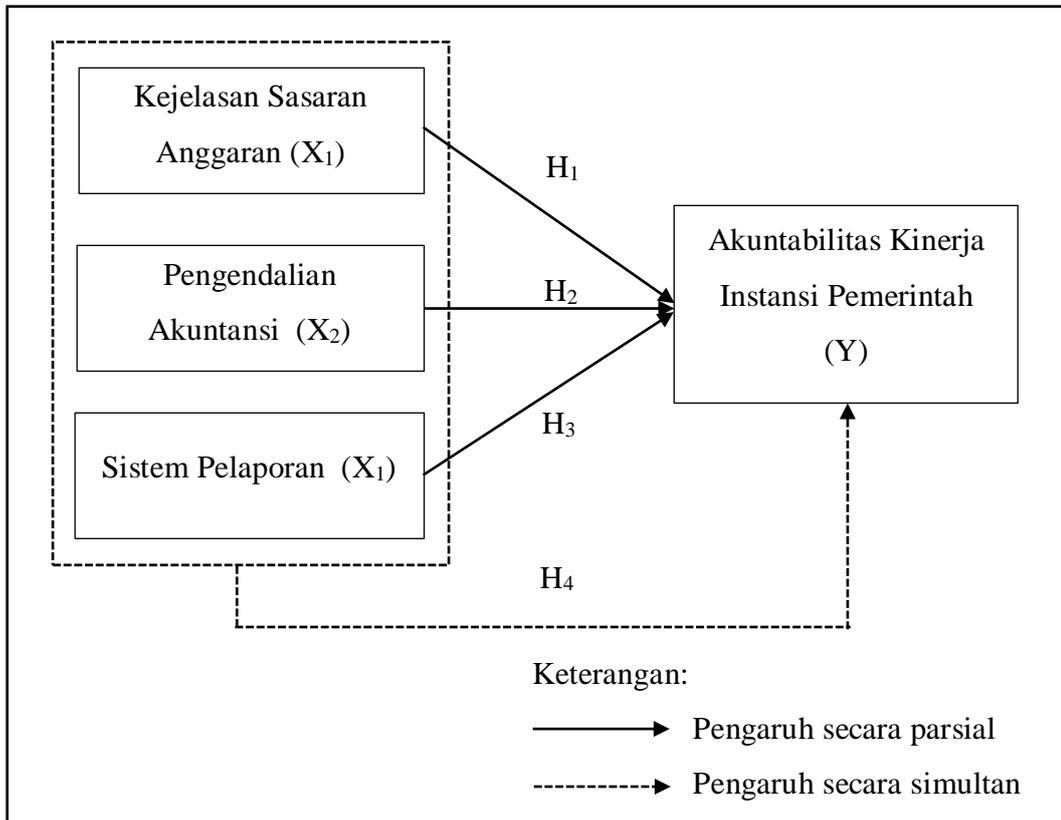
No	Nama Peneliti	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
8.	(Widaryanti & Pancawardani, 2020)	X ₁ : Pengendalian Akuntansi X ₂ : Sistem Pelaporan X ₃ : Kejelasan Sasaran Anggaran	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap AKIP 2. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap AKIP 3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap AKIP
9.	(Isnanto dkk., 2019)	X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran X ₂ : Pengendalian Akuntansi X ₃ : Sistem Pelaporan	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap signifikan AKIP 2. Pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap AKIP 3. Sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap AKIP
10	(Hayani & Julita, 2021)	X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran X ₂ : Kompetensi Aparatur Pemerintah X ₃ : Pengendalian Intern X ₄ : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru	1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap AKIP 2. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap AKIP 3. Pengendalian intern berpengaruh terhadap AKIP 4. Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap AKIP

Sumber: data yang diolah, 2023

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir di atas di mana pada penelitian ini kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan sebagai variabel independen serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Objek penelitian yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dalam masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber: data yang diolah, 2023

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar di atas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara parsial maupun simultan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui

analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian.

2.4.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, di mana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas memudahkan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian terdahulu yaitu Febrianti & Yuhertiana, (2021) dan Rahayu & Yudi, (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1 : Diduga terdapat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.4.2 Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian diperlukan untuk mencegah kemungkinan penyimpangan dari orang-orang tertentu. Penggunaan pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengelola operasi dengan lebih efisien, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah juga menuntut adanya pengendalian akuntansi untuk mengetahui sejauh mana wewenang dan tanggung jawab telah diberikan digunakan secara tepat.

Uraian di atas didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Anisa & Haryanto, (2022), Septiyani dkk., (2020), dan Hayani & Julita, (2021) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2 : Diduga terdapat pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.4.3 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pelaporan berguna untuk memantau dan mengendalikan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan yang baik yang dapat menyajikan informasi secara terbuka tentang keputusan yang dibuat oleh pemerintah selama periode tertentu dan memantau serta mengontrol kinerja pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan.

Uraian diatas didukung oleh penelitian terdahulu yaitu oleh Anisa & Haryanto, (2022), Septiyani dkk., (2020), dan Aprilianti dkk., (2020) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3 : Diduga terdapat pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

2.4.4 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah juga menuntut adanya pengendalian akuntansi untuk mengetahui sejauh mana wewenang dan tanggung jawab telah diberikan digunakan secara tepat. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengontrol kinerja atasan dalam mencapai kinerja pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H4 : Diduga terdapat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah